

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2004). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial: pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan (Vol. 1). FISIP UI Press.
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Ardianto Try Hendra, *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan*. (Yogyakarta: Polgov,2016), hlm 7
- Ardial. & Tanjung Bahrudi, N. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Baskara Fajar, 2017. *Implementasi Dana Desa di Kabupaten Bantul Studi Kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2014-2016*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi tidak di publikasikan.
- Betaria Magdalena, Dkk, *Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Kutai:Fisip Unmul,2013).
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dalman, 2011. *Menulis Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Karisma Putra Utama
- Dewi Laksita Ardwicka. (2016). *Tata Kelola Dana Alokasi Desa, Studi Participatory Governance Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*.Skripsi Mahasiswa Fisif.
- Moeloeng, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Miftachul Huda. (2009). Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nabawi Handari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1985
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Syaukani, HR. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar. 2012 Yogyakarta hlm 173.
- Stiglitz Joseph.E. (2011). Mengukur kesejahteraan. Bintaro: Pojok Kiri. PT Wahana Aksi Kritika, hlm 14
- Singaribun Masri Dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survey. Lp3s. Jakarta. 1989 hlm 37
- Suparjan, Hempri. (2003). Pengembangan masyarakat, (dari pembangunan sampai pemberdayaan). Yogyakarta: Aditya Media
- Salim, A. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Todaro dan Stephen C. Smith (2006), economic development jilid 1 Erlangga.Jakarta , hlm 248

Jurnal

- Arista Maria Yovani Putu Arista, Tedi Erviantono, Ni Wayan Supriliyanii.2015, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)
- Ariska Febri Hanna. (2016). Faktor Pendukung Dan Kendala Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Skripsi Mahasiwa Universitas Lampung Bandar Lampung.
- BKKBN, 1993, Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional, BKKBN Pusat, Jakarta.
- Melyanti, I. M. (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 2.

- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rindawan, I. K. (2016). Pengaruh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Otonomi Desa Adat Di Bali. *Widya Accarya*, 5(1).
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan keuangan desa: dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan petunjuk pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Fokusmedia.
- Pranarka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan AMW Pranarka (end), 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Impelementasi
- Sudiar, S. (2017). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. *Jurnal Paradigma (JP)*, 1(3), 389-401.
- Wirawan, C. Y. (2015). Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2).

Undang-Undang

No, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa. Penerbit Sinar Garafika Jakarta.

No, U. U. (32). Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
<http://www.bphn.go.id> di akses pada tanggal 2 November 2017 pukul 12.11 WIB

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (No. 42). Lembaran Negara RI Tahun
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan menteri keuangan No. 49

Peraturan menteri dalam negeri No. 114 pasal 1 No. 5

Peraturan Presiden (PP) No. 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) *Peran KUD (Koperasi Unit Desa)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Internet

Ardiansyah Moch, Pencairan Dana Desa 2016 di Bagi Menjadi Tiga Tahap, <http://www.merdeka.com> di akses pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 10.23 WIB

dppka.jogjaprov.go.id: <http://dppka.jogjaprov.go.id> diakses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 14.46 WIB.

Hdy, Dana Desa Tambahan Dari Kabupaten Bantul, <http://Tribunjogja.com> di akses pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 12.11 WIB

Huda Muhammad Nur, Hebat Badan Usaha Milik Desa Tirtonirmolo Beromzet Miliaran Rupiah, <http://jogja.tribunnews.com> di akses pada tanggal 5 oktober 2017 pukul 13.45 WIB

Raharjo Mudji . (2017). Korelasi Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Masyarakat Desa. Jurnal Mahasiswa Fisip, <http://csws.fisip.unair.ac.id> di akses pada tanggal 1 November 2017 pukul 23.33 WIB.

KabBantul.go.id:https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 14.32 WIB